

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN MENGENAI PERLINDUNGAN TKI DILUAR NEGERI**

**Cut Permata Sari**

## **Abstrak**

Tenaga Kerja Indonesia pada saat ini, umumnya sebagian besar merupakan seorang wanita. Mereka berusaha mencari pekerjaan dengan gaji yang besar untuk dapat menghidupi keluarga dan dirinya dengan menjadi tenaga buruh dan pembantu rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan bersifat prosedural yang telah ditentukan pemerintah maupun akibat minimnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan latar belakang, maka perlu dikaji permasalahan mengenai Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja Wanita terhadap pelaku kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Diluar Negeri dan bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah tindak pidana kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Diluar Negeri. Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan melukiskan fakta-fakta berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh majikan atau tersangka merupakan suatu tindak pidana penganiayaan dan perampasan hak kemerdekaan hidup seseorang sesuai dengan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Diluar Negeri, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia khususnya Tenaga Kerja Wanita yang sering mengalami perlakuan tidak wajar diluar negeri.

**Kata Kunci** : Tenaga Kerja Indonesia, TKI

# **LEGAL PROTECTION OF VIOLENCE AGAINST INDONESIA LABOR ASSOCIATED OF THE CRIME WITH THE LAW ABOUT PROTECTION OF INDONESIA LABOR (TKI) IN FOREIGN COUNTRIE**

**Cut Permata Sari**

## **Abstract**

Indonesia's labor at the moment, generally most was a woman. They are trying to find a great paying job to be able to raise a family and himself by labor and the housekeeper. But in fact there are still many procedural irregularities occur is determined by the Government and due to the lack of labour protection against Indonesia. Based on the background, then it needs to be examined problems regarding legal actions what can be done by Labour Women against the perpetrators of violence in terms of Act No. 39 of 2004 concerning the placement and protection of Lands outside the TKI and how the efforts made the Government of Indonesia in tackling the problem of criminal acts of violence and provide protection against Women in terms of Labour Act No. 39 of 2004 concerning the placement and protection of Lands outside the TKI. Research conducted by analytical descriptive nature writer describes the facts of primary data and secondary data by using the juridical normative approach method. The resulting data is analyzed legally qualitative hierarchy, so that the legislation can be seen as well as can guarantee legal certainty. Based on an analysis of the data obtained it was concluded that the acts committed by the employer or the suspect is a criminal act of persecution and deprivation of the right to independence of life a person pursuant to section 7 and the Universal Declaration of human rights is associated with the Legislation – Act No. 39 of 2004 Concerning the placement and protection of the Government of the country, outside of the TKI is obliged to provide protection to the workforce of Indonesia in particular Labour women who often have unusual treatment outside the country.

**Key Word** : Indonesian labor, TKI Indonesia